

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Taiwan tetap menghadapi beberapa konfrontasi politik dari Tiongkok di lingkup internasional dan tentu Taiwan tidak diuntungkan dari segala sisi. Maka kemudian melalui penerapan konsep *small states diplomacy*, Taiwan dapat memaksimalkan kapabilitas negara yang dimiliki beserta posisi geografis, budaya politik dan rancangan institusi domestik, serta strategi politik melalui kebijakan luar negeri yang bertumpu pada pendekatan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain. *Diplomatic recognition*, berperan untuk menganalisis bagaimana Taiwan dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki, ditinjau dari kedaulatan eksternal, keterlibatan dalam organisasi internasional di bidang perdagangan dan perekonomian, serta legitimasi yang didapatkan dari kedekatan hubungan dengan Amerika Serikat dan pemanfaatan momentum di isu internasional. Dalam rentang pemerintahan Tsai Ing-wen semua hal tersebut berjalan dengan baik dan cukup lancar untuk tetap mempertahankan kedaulatan Tsai Ing-wen secara *status quo*.

Akan tetapi pada periode ke-dua Tsai Ing-wen, dirinya tetap tidak dapat berhenti dalam mencari perhatian publik internasional dikarenakan selama status Taiwan belum berdaulat secara formal, maka ancaman terhadap Taiwan dari pihak Tiongkok juga akan terus berkembang. Upaya-upaya tersebut memang dapat dikatakan sukses, tetapi masih dalam tingkatan ‘menjaga’ atau ‘mempertahankan’ *status quo* belum sampai ke tahap kedaulatan yang utuh. Taiwan masih dikatakan

cukup jauh untuk menjadi negara yang sepenuhnya berdaulat karena beberapa hal, hubungan dagang atau ekonomi umumnya lebih bersifat dinamis berdasarkan *demand* dan *supply*, tidak adanya negara besar yang mengakui Taiwan secara formal, dan minimnya kerjasama diplomatik karena permasalahan status kedaulatan Taiwan.

4.2 Saran

Taiwan tetap dapat mempertahankan upayanya dalam menjaga kedaulatannya dengan cara seperti itu, tetapi kunci utamanya adalah tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dinilai sebagai aktor kunci untuk menghambat Tiongkok untuk bertindak lebih koersif dalam penerapan *One-China Principle*. Adanya hukum internasional juga setidaknya menghambat Tiongkok untuk melakukan operasi yang berlebihan kepada Taiwan, mengingat posisi Tiongkok di Dewan Keamanan Tetap PBB juga menjadi mudah untuk dipantau di perpolitikan internasional.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, referensi, hingga kajian keilmuan dalam menginterpretasikan beberapa konsep atau menganalisis suatu permasalahan khususnya di pembahasan mengenai Taiwan dan Tiongkok ini. Besar harapan peneliti agar nantinya ke depan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk melanjutkan penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan memiliki banyak manfaat dalam keilmuan Hubungan Internasional.